

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 tahun 2012 dalam hal prosedur pelaksanaan pengelolaan.
2. Pengadaan dengan cara hibah juga mengalami kendala, hibah yang berupa tanah mengalami kendala dalam hal pengurusan administrasi. Hal ini dikarenakan objek tanah tersebut mengenai surat kepemilikannya yang dahulu terdapat permasalahan. Sehingga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menerima tanah hibah tersebut, kesulitan dalam hal kepengurusan pemindahan status kepemilikan tanah tersebut.

Selanjutnya yang menjadi kendala yaitu mengenai inventarisasi barang, barang yang berada di dalam gedung-gedung ataupun instansi pemerintahan belum secara keseluruhan terinventarisasi dengan baik. Permasalahan mengenai inventarisasi juga terdapat didalam instansi pendidikan yaitu pada sekolah dasar, kerbatasan sumber daya manusia yang ada di dalam instansi sekolah dasar menjadi faktor penyebab belum terinventaris mengenai

barang-barang penunjang pendidikan, yang barang tersebut berasal dari pemerintah daerah.

Belum adanya peraturan yang menjebatani antara peraturan pusat dengan yang ada di daerah mengenai pengelolaan menjadi salah satu penyebab terjadinya kendala dalam pengelolaan barang milik daerah, dalam lain hal juga terdapat kendala mengenai sistem pelaporan diantara akuntansi publik dengan pelaporan barang milik daerah.

## **B. Saran**

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berada didalam lingkup kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Melakukan koordinasi dengan kepada daerah dan bagian akuntan publik, sehingga permasalahan mengenai pelaporan antara pengelolaan aset dan akuntan publik dapat menemukan titik tengah sehingga pelaporan pengelolaan aset bisa berdiri sendiri, dalam lain hal semoga kedepannya terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai teknis pelaporan sehingga dapat membedakan antara pengelolaan aset dan akuntan publik.